

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S2 HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT (SKS)	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN	
PERADILAN TATA USAHA NEGARA	HKM22 0125	ILMU HUKUM	2 SKS	2	01 Agustus 2021	
	L	DOSEN PENGEMBANG RPS	KOORDINATOR RMK		KAPRODI	
OTORISAS	I	Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H., M.H. NIP 197308042006041001	Dr. Abdul Halim, M.Ag NIP 196706081994031005	Dr. Beniharmoni Harefa, SH, LL.M. NIP 198709222018031002		
	CPL-PROI			-		
CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)	S-2 S-3 S-4 S-6 S-7 S-8 S-9 KU-1 KU-2 KU-4	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menja Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan Berperan sebagai warga negara yang bangga dan c Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta k Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasy Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademih Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerja Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, s memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora y Mampu menunjukan kinerja mandiri, bermutu dan Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiar perguruan tinggi. Mampu menganalisis (analyse) teori hukum bid keindonesiaan dan Kemanusiaan dengan pendekata Kemampuan menerapkan (applied) metode dan opinion, legal audit, legal contract, legal drafting, dalam masyarakat sesuai dengan lingkup pekerjaan	bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kinta tanah air, memiliki nasionalisme serta mepedulian terhadap masyarakat dan lingkur yarakat dan bernegara kan di bidang keahliannya secara mandiri sistematis, dan inovatif dalam konteks yang sesuai dengan bidang keahliannya terukur na tersebut di atas dalam bentuk skripsi ata lang hukum tata negara, perdata, pidana, lan multi-disipliner logika berpikir dan penalaran hukum (leg putusan dan eksaminasi serta dokumen hu	temajuan peradaban rasa tanggungjawab ngan pengembangan im tu laporan tugas akl bisnis, dan hukum ral reasoning) untuk	pada negara dan bangsa uplementasi ilmu pengetahuan yang nir, dan mengunggahnya dalam laman internasional secara integratif dengan a menyusun legislative drafting, legal	

	Kemampuan mempraktikan keterampilan komunikasi, berfikir kritis dan inovatif, literasi teknologi informasi, kolaborasi dan <i>teamwork</i> , <i>networking</i> , literasi finansial, respek terhadap sesama dan <i>long life learning</i>					
	CP-MK					
	1 Mahasiswa mampu memahami konsep dasar Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) 2 Mahasiswa mampu memahami Keputusan TUN					
	3 Mahasiswa mampu memahami Kedudukan PTUN					
	4 Mahasiswa mampu memahami Susunan PTUN					
	Mahasiswa mampu memahami Acara Pemeriksaan persidangan pada PTUN					
	Mahasiswa mampu memahami Prosedur pemeriksaan di PTUN					
	1 Manasiswa mampu memananii Proseddi pemenksaan di Pron					
	Nanasiswa mampu memanami Peneriksaan dalam PTON					
	Nanasiswa mampu memanami kompetensi PTON berdasarkan OO No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan					
D 1 : : : : : : .	Mahasiswa mampu memahami Administrasi perkara dan persidangan pada PTUN secara elektronik					
Deskripsi Singkat	Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang meliputi materi: (1) Konsep dasar PTUN; (2) Keputusan TUN; (3)					
MK	Kedudukan PTUN; (4) Susunan PTUN; (5) Acara Pemeriksaan persidangan pada PTUN; (6) Prosedur pemeriksaan di PTUN; (7) Pemeriksaan dalam PTUN; (8)					
	Kompetensi PTUN berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; dan (9) Administrasi perkara dan persidangan pada PTUN secara					
3.5	elektronik.					
Materi	1. Konsep dasar PTUN					
Pembelajaran/Pokok	2. Keputusan TUN					
Bahasan	3. Kedudukan PTUN					
	4. Susunan PTUN					
	5. Acara Pemeriksaan persidangan pada PTUN					
	6. Prosedur pemeriksaan di PTUN 7. Pemeriksaan dalam PTUN					
	8. Kompetensi PTUN berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 9. Administrasi perkara dan persidangan pada PTUN secara elektronik					
Dugtala						
Pustaka	1. Mahkamah Agung RI, Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat dari Beberapa Sudut Pandang, Jakarta: MA RI, 2011.					
	2. Siti Kotijah, <i>Hukum Acara dan Praktek Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN</i>), Yogyakarta: CV MFA, 2020.					
	3. Martitah, Arif Hidayat, Aziz W. Nugroho, <i>PTUN dalam Optik Undang-Undang Administrasi Pemerintahan</i> , Semarang: BPFH UNNES, 2018.					
	4. Zairin Harahap, <i>Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia</i> , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.					
	5. Wicipto Setiadi, <i>Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara: Suatu Perbandingan</i> , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994.					
	6. Indroharto, <i>Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara</i> , Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.					
	7. Philipus M. Hadjon, et. al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.					
	8. Prajudi Atmosudirjo, <i>Hukum Administrasi Negara</i> , Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.					
	9. Ridwan H.R., <i>Hukum Administrasi Negara</i> , Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.					
	10. Safri Nugraha, et. al, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: CLGS FH UI, 2007.					
	11. Amrah Muslimin, Beberapa Asas dan Pengertian Pokok tentang Administrasi Negara dan Hukum Administrasi, Bandung: Alumni, 1985.					
	11. Allı'di Muslillili, Beberapa Asas dan Fengerian Fokok tentang Administrasi Negara dan Hakam Administrasi, Balldulig, Alullili, 1983. 12. Sjahran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung: Alumni, 1989.					
L	12. Spaintait Dustai, Ensistensi aan 1010k Okai Daaan 1 eraataan Ataministrasi at Indonesia, Danaang, Ataninii, 1707.					

		14. Ror 15. Und 16. Und 17. Und 18. Und 19. Und Pendukung 1. Buku a 2. Jurnal-	nald A. Cass, Administrative Lav dang-Undang Nomor 5 Tahun 19 dang-Undang Nomor 9 Tahun 20 dang-Undang Nomor 51 Tahun 2 dang-Undang Nomor 30 Tahun 2 dang-Undang Nomor 37 Tahun 2	v: Cases and Materials 186 tentang PTUN. 1004 tentang Perubahan 1009 tentang Perubahar 1014 tentang Administr 1008 tentang Ombudsm		20. a 1986 tentang PTUN.	ang PTUN.	
Media	a Pembelajaran	Sinkronus	dan Asinkronus		Perangkat Keras			
Taam	Teaching	 Webex Live Po Wa Gro Cloudx Asynchron E-Lean LMS M Google Travell Quizziz Youtob Kahoot 	e Meet oft Teams colling coup conous: ning UPNVJ Moodle Kemendikbud e Classroom oo z		Laptop, Kompute	r, Tablet, Smartphone		
Team	Teaching	Di. Aiiiiau	Alishi Thohan, S.H., Wi.H.					
Mata]	Kuliah Syarat	Hukum Ad	ministrasi Negara, Hukum Tata	Negara				
Mg ke-	Kemampuan <i>A</i> Diharap		Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Metode Evaluasi	Bobot Nilai
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa man mengerti dan m		Konsep dasar PTUN	Perkenalan	2 x 50 menit	Kajian pustakaDiskusi	Kemampuan menguraikan	10 %

	konsep dasar PTUN yang meliputi negara hukum, tujuan PTUN, dasar hukum PTUN, dan konsep dasar pengaturan PTUN	 Negara hukum Tujuan PTUN Dasar Hukum PTUN Konsep dasar pengaturan PTUN 	Kuliah interaktif			identitas, deskripsi dan tujuan matakuliah	
2 dan 3	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang meliputi keputusan dan/atau tindakan dalam UU No. 30/2014 tentang AP, pengertian KTUN, keputusan berbentuk elektronis, badan atau pejabat pemerintahan, Pengujian KTUN dalam gugatan PTUN, Kekecualian KTUN	Keputusan Tata Usaha Negara 1. Keputusan dan/atau tindakan dalam UU No. 30/2014 tentang AP 2. Pengertian KTUN 3. Keputusan berbentuk elektronis 4. Badan atau pejabat pemerintahan, 5. Pengujian KTUN dalam gugatan PTUN 6. Kekecualian KTUN	 PBL Tutorial Studi kasus 	 Synchronous Meeting (45 menit) Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit) 	 Kajian pustaka Diskusi 	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	10 %
4 dan 5	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami kedudukan PTUN yang meliputi kompetensi PTUN, pihak yang berperkara dalam PTUN, gugatan balik atau gugatan rekonvensi, dan pembinaan dan pengawasan PTUN	Kedudukan PTUN 1. Kompetensi PTUN 2. Pihak yag berperkara dalam PTUN 3. Gugatan balik atau gugatan rekonvensi 4. Pembinaan dan pengawasan PTUN	 PBL Tutorial Studi kasus Demonstrasi dan Roleplay (LDR) 	 Synchronous Meeting (45 menit) Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit) 	Kajian pusakaDiskusiStudiKasus	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	10 %
6 dan 7	Mahasiswa mampu mengerti susunan PTUN yang meliputi hakim, kode etik dan pedoman perilaku hakim, panitera, sekretaris, juru sita, kekuasaan PTUN	Susunan PTUN 1. Hakim 2. Kode etik dan pedoman perilaku hakim 3. Panitera 4. Sekretaris 5. Juru sita 6. Kekuasaan PTUN	PBL TutorialStudi kasus	 Synchronous Meeting (45 menit) Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit) 	Kajian pusakaDiskusi	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	10 %

		7. Kompetensi PTUN					
8			UJIAN TE	NGAH SEMESTER (UTS)			
9	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami acara pemeriksaan persidangan PTUN yang meliputi karakteristik PTUN, gugatan, tenggang waktu menggugat, tempat mengajukan gugatan, intervensi pihak ketiga, dan kuasa hukum	Acara pemeriksaan persidangan PTUN 1. Karakteristik PTUN 2. Gugatan 3. Tenggang waktu menggugat 4. Tempat mengajukan gugatan 5. Intervensi pihak ketiga 6. Kuasa hukum	 PBL Tutorial Studi kasus Demonstrasi dan Roleplay (LDR) 	 Synchronous Meeting (45 menit) Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit) 	Kajian pusakaDiskusi	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	10 %
10	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami prosedur pemeriksaan di PTUN yang meliputi pengaturan prosedur pemeriksaan perkara, penelitian administrasi di kepaniteraan PTUN, proses dismisal, permohonan beracara dengan cuma-cuma, permohonan penundaan pelaksanaan KTUN yang disengketakan, dan proses pemeriksaan dengan acara cepat	Prosedur Pemeriksaan di PTUN 1. Pengaturan prosedur pemeriksaan perkara 2. Penelitian administrasi di kepaniteraan PTUN 3. Proses dismisal, 4. Permohonan beracara dengan cuma-Cuma 5. Permohonan penundaan pelaksanaan KTUN yang disengketakan, 6. Proses pemeriksaan dengan acara cepat	 PBL Tutorial Studi kasus Demonstrasi dan Roleplay (LDR) 	 Synchronous Meeting (45 menit) Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit) 	 Kajian pusaka Diskusi 	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	10 %
11 dan 12	Mahasiswa mampu mengerti dan memahami persidangan dalam PTUN yang meliputi	Persidangan PTUN 1. Pemeriksaan Persiapan 2. Pemeriksaan Acara Biasa dalam Sidang Terbuka Untuk Umum 3. Tergugat Tidak Hadir dalam Persidangan 4. Perubahan gugatan 5. Perdamaian 6. Intervensi	PBL TutorialStudi kasus	 Synchronous Meeting (45 menit) Penugasan elearning 4.0 UPNVJ (45 menit) 	Kajian pusakaDiskusi	Penilaian keaktifan diskusi dan umpan balik	15 %

				_			
		7. Replik					
		8. Duplik					
		9. Pembuktian					
		10. Kesimpulan					
13	Mahasiswa mampu	Kompetensi PTUN	PBL Tutorial	Synchronous Meeting (45	Kajian pusaka	Penilaian keaktifan	15 %
dan	mengerti dan memahami	berdasarkan UU AP	Studi kasus	menit)	Diskusi	diskusi dan umpan balik	
14	kompetensi PTUN	1. Pengaturan UU No.30		Penugasan elearning 4.0		_	
	berdasarkan UU No.	Tahun 2014 tentang		UPNVJ (45 menit)			
	30/2014 tentang AP yang	Administrasi					
	meliputi pengaturan PTUN	Pemerintahan					
	dalam UU AP, perluasan	Perluasan Kompetensi					
	Kompetensi, perluasan	3. Perluasan Pemaknaan					
	pemaknaan KTUN,	Keputusan Tata Usaha					
	perluasan subyek hukum,	Negara					
	perluasan obyek hukum,	4. Perluasan Subyek Hukum					
	Pedoman Beracara Dalam	5. Perluasan Obyek Hukum					
	Penilaian Unsur	6. Pedoman Beracara Dalam					
	Penyalahgunaan	Penilaian Unsur					
	Wewenang, edoman	Penyalahgunaan					
	Beracara Untuk	Wewenang					
	Memperoleh Putusan Penerimaan Permohonan	7. Pedoman Beracara Untuk					
		Memperoleh Putusan					
	Guna Mendapatkan Keputusan Dan/atau	Penerimaan Permohonan					
	Tindakan Badan atau	Guna Mendapatkan					
	Pejabat Pemerintahan	Keputusan Dan/atau					
	(Fiktif Positif), pedoman	Tindakan Badan atau					
	Penyelesaian Sengketa	Pejabat Pemerintahan					
	Tindakan Pemerintahan	(Fiktif Positif)					
	dan Kewenangan	8. Pedoman Penyelesaian					
	Mengadili Perbuatan	Sengketa Tindakan					
	Melanggar Hukum oleh	Peme-rintahan dan					
	Badan dan/atau Perbuatan	Kewenangan Mengadili					
	Melanggar Hukum oleh	Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan					
	Badan dan/atau Pemerintah	Hukum oleh Badan dan/atau Perbuatan					
	(Onrechmatige	Melanggar Hukum oleh					
	Overheidsdaad), dan	Badan dan/atau					
	Pedoman Beracara dalam	Pemerintah dan/atau					
	Sengketa Penetapan Lokasi	1 Cilicilitaii					

	Pembangunan Untuk	(Onrechmatige				1	
	Kepentingan Umum pada	Overheidsdaad)					
	PTUN	9. Pedoman Beracara dalam					
	TION						
		Sengketa Penetapan					
		Lokasi Pembangunan					
		Untuk Kepentingan Umum pada PTUN					
1.5	Mahasiswa mampu		PBL Tutorial	A Complement Marting (45	• Vaiion museles	Penilaian keaktifan	10 %
15	mengerti dan memahami	Administrasi perkara dan persidangan di PTUN	Studi kasus	Synchronous Meeting (45 menit)	Kajian pusakaDiskusi		10 %
	administrasi perkara dan	secara elektronik	• Studi kasus	Penugasan elearning 4.0	• Diskusi	diskusi dan umpan balik	
	persidangan di pengadilan			UPNVJ (45 menit)			
	secara elektronik yang			OT NVJ (43 memi)			
	meliputi filosofi	Perkara dan Persidangan					
	1	di Pengadilan Secara					
	administrasi perkara dan	Elektronik					
	persidangan di pengadilan	2. Pengaturan Administrasi					
	secara elektronik,	Perkara dan Persidangan					
	pengaturan administrasi	di Pengadilan Secara					
	perkara dan persidangan di	Elektronik					
	pengadilan secara	Konsep Dasar					
	elektronik, konsep dasar	Administrasi Perkara					
	administrasi perkara	Persidangan di					
	persidangan di pengadilan	Pengadilan Secara					
	secara elektronik,	Elektronik					
	penggunaan layanan	4. Penggunaan Layanan					
	administrasi perkara	Administrasi Perkara					
	secara elektronik,	Secara Elektronik					
	persidangan secara	5. Persidangan Secara					
	elektronik	Elektronik					
	tata kelola dalam	6. Tata Kelola Dalam					
	administrasi perkara di	Administrasi Perkara di					
	lingkungan pengadilan	Lingkungan Pengadilan					
16		-	UJIAN AK	HIR SEMESTER (UAS)			

RUBRIK PENILAIAN DISKUSI KASUS/ DAN PRESENTASI

No	Aspek yang dinilai	Nilai	Kriteria Nilai
1	Komunikasi	4	Terdiri dari 4 aspek
	a. Mendengarkan secara aktif	3	Terdiri dari 3 aspek
	 b. Membantu anggota lain memahami apa yang disampaikan c. Menggunakan Bahasa sopan, jelas 	2	Terdiri dari 2 aspek
	d. Menunjukkan rasa percaya diri	1	Terdiri dari 1 aspek
2	Diskusi	4	Terdiri dari 4 aspek
	a. Mengajukan pendapat dan perasaan dengan cara yang konstruktif		
	b. Menunjukkan dukungan terhadap anggota lain	3	Terdiri dari 3 aspek
	c. Berani mengungkapkan pendapat	2	Terdiri dari 2 aspek
	d. Menjawab pertanyaan teman dengan baik	1	Terdiri dari 1 aspek
3	Keterbukaan	4	Terdiri dari 4 aspek
	a. Menyatakan apa yang ingin dipelajari		
	b. Meminta umpan balik terhadap dirinya	3	Terdiri dari 3 aspek
	c. Berespon baik terhadap masukan teman	2	Terdiri dari 2 aspek
	d. Cepat dalam memberikan respon	1	Terdiri dari 1 aspek
4	Perilaku dalam kelompok	4	Terdiri dari 4 aspek
	a. Bersedia menerima tugas dan perilaku khususb. Menggunakan pengetahuan dan pengalaman anggota lain	3	Terdiri dari 3 aspek
	c. Hasil tugas relevansi dengan bahan	2	Terdiri dari 2 aspek
	d. Berpartisipasi dalam penugasan kelompok	1	Terdiri dari 1 aspek
5	Kemampuan belajar 4.0 1. Memecahkan masalah kompleks	4	Terdiri dari 9 aspek
	2. Berpikir kritis3. Kreatifitas	3	Terdiri dari 6-8 aspek
	4. Management orang	2	Terdiri dari 3-5 aspek
	Berkoordinasi dengan orang lain Kecerdasan emosional	1	Terdiri dari 1-2 aspek
	7. Keluwesan berpikir	•	l train duit i 2 dopon
	8. Literasi digital		
	Menggunakan informasi		

NILAI: <u>Jumlah Nilai</u> x 100 24

RUBRIK PENILAIAN TUGAS PRESENTASI PAPER/MAKALAH

GRADE	SKOR	INDIKATOR KINERJA
Sangat kurang	<20	Tidak ada ide yang jelas untuk menjawab pertanyaan dalam topik bahasan
Kurang	21–40	Ada ide yang dikemukakan, namun kurang sesuai dengan pertanyaan dalam topik bahasan
Cukup	41-60	Ide yang dikemukakan jelas dan sesuai, namun kurang inovatif
Baik	61-80	Ide yang dikemukakan jelas, mampu menyelesaikan masalah, inovatif, cakupan tidak terlalu luas
Sangat Baik	>81	Ide, jelas, inovatif, dan mampu menyelesaikan masalah dengan cakupan luas

RUBRIK PENILAIAN TUGAS SIMULASI PENYELESAIAN KASUS HUKUM

No	Aspek yang dinilai	Nilai	Kriteria Nilai
			Kedalaman dan ketepatan analisis
1	Berkas	50 %	Kerapihan
1	Derkas	30 %	Penggunaan bahasa
			Gaya selingkung
			Kerjasama tim
	Performance		Kelancaran
2		50 %	Bahasa yang digunakan
			Manner
			Responsive
			Kerjasama tim

GRADE	SKOR
Sangat kurang	<20
Kurang	21–40
Cukup	41-60
Baik	61- 80
Sangat Baik	>81

Jakarta, 01 Agustus 2021

Dosen Pengembang RPS,

NIP 197308042006041001

Dr. Ahmad Ahsin Thohari, S.H., M.H.

Penelaah, Gugus Kendali Mutu

Disetujui, Kaprodi S2 Hukum

> Peniharmoni Harefa, SH, LL.M 198709222018031002

Siti Nurul Intan S.D, S.H., M.Kn. NIDN 0006108701

1